

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA SOLO, KOTA SEMARANG, DAN POLITIK DINASTI PRESIDEN JOKOWI

2.1 Kota Solo

2.1.1 Kondisi Geografis

Kota Solo merupakan nama populer dari sebuah wilayah otonom setingkat kota yang berada di dalam Provinsi Jawa Tengah. Kota dengan nama resmi Surakarta ini terletak di bagian tenggara Provinsi Jawa Tengah dengan posisi astronomisnya berkisar antara $110^{\circ}45'15''$ dan $110^{\circ}45'35''$ bujur timur, serta $7^{\circ}36'$ dan $7^{\circ}56'$ lintang Selatan (BPS Kota Surakarta, 2024). Dengan posisi astronomis tersebut, Kota Solo berbatasan langsung dengan Kabupaten Boyolali di bagian barat laut, Kabupaten Sragen di bagian timur laut, Kabupaten Karanganyar di bagian timur, Kabupaten Sukoharjo di bagian selatan, serta Kabupaten Klaten di bagian barat daya.

Gambar 2. 1 Wilayah Kota Solo dilihat dari Peta Jawa Tengah



Sumber: www.lamudi.co.id/journal/peta-jawa-tengah

Berdasarkan data yang dihimpun pada laman BPS Kota Surakarta, Kota Solo memiliki luas wilayah sebesar 46,72 km². Angka tersebut terhitung cukup luas bagi sebuah kota madya, sehingga menempatkan Kota Solo menjadi kota dengan luas wilayah terbesar ketiga di Jawa Tengah setelah Kota Semarang dengan luas 370 km², serta Kota Salatiga dengan luas 54,98 km² (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024). Dari luas wilayah tersebut, Kota Solo terbagi menjadi 5 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres, hingga Kecamatan Banjarsari. Adapun luas wilayah Kota Solo secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kota Solo

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1.	Laweyan	9,13
2.	Serengan	3,08
3.	Pasar Kliwon	4,88
4.	Jebres	14,38
5.	Banjarsari	15,26
Jumlah		46,72

Sumber: BPS Kota Surakarta 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa Kecamatan Banjarsari menjadi kecamatan dengan wilayah paling luas di Kota Solo. Kecamatan Banjarsari memiliki luas wilayah mencapai 15,26 km², atau jika dipersentasekan sebesar 32,66% dari total keseluruhan luas wilayah Kota Solo. Kecamatan Banjarsari terletak di bagian utara Kota Solo dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar. Adapun kecamatan dengan luas wilayah terkecil di Kota Solo adalah Kecamatan Serengan. Kecamatan Serengan hanya memiliki luas wilayah sebesar 3,08 km², atau jika dipersentasekan sebesar 6,59% dari total keseluruhan luas wilayah Kota Solo.

Kecamatan Serengan terletak di sisi barat daya Kota Solo dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukoharjo.

Gambar 2. 2 Peta Wilayah Kota Solo Berdasarkan Kecamatan



Sumber: <https://peta-hd.com/peta-kota-surakarta/>

Pusat pemerintahan Kota Solo terletak di Kecamatan Pasar Kliwon. Berbagai gedung pemerintahan seperti kantor Walikota dan Wakil Walikota, kantor DPRD, hingga kantor dinas dan lembaga di bawah Pemerintah Kota Surakarta berada di Kecamatan Pasar Kliwon. Sebagai sebuah kota dengan luas wilayah 46,72 km², Kota Solo memiliki konektivitas yang baik antar wilayahnya. Hampir setiap wilayah di Kota Solo memiliki jarak yang tidak begitu jauh dengan pusat pemerintahan. Adapun jarak antara kecamatan di Kota Solo dengan pusat pemerintahan dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Jarak antara Kecamatan dengan Pusat Pemerintahan di Kota Solo

No.	Kecamatan	Jarak Menuju Pusat Pemerintahan (km)
1.	Laweyan	3,2
2.	Serengan	2,8
3.	Pasar Kliwon	2,2
4.	Jebres	3,5
5.	Banjarsari	7,5

Sumber: BPS Kota Surakarta 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa Kecamatan Pasar Kliwon menjadi kecamatan dengan jarak paling dekat dengan pusat pemerintahan. Hal ini tentu tidak terlepas dari keberadaan gedung-gedung pemerintahan yang terletak di Kecamatan Pasar Kliwon. Adapun kecamatan dengan jarak paling jauh dengan pusat pemerintahan adalah Kecamatan Banjarsari. Kecamatan Banjarsari merupakan kecamatan yang berada di ujung utara Kota Solo, sehingga memiliki jarak yang paling jauh dengan pusat pemerintahan.

2.1.2 Kondisi Demografis

Pada tahun 2023, Kota Solo atau yang secara administratif dikenal sebagai Kota Surakarta memiliki jumlah penduduk sebanyak 526.870 jiwa. Jumlah ini mencakup 259.305 penduduk laki-laki dan 267.565 penduduk perempuan dengan rentang usia mulai dari 0-75 tahun keatas (BPS Kota Surakarta, 2024). Berdasarkan angka tersebut, dapat diketahui bahwa rasio jenis kelamin di Kota Solo mencapai 96,9, dengan persentase penduduk laki-laki sebesar 49,22% dan persentase penduduk perempuan sebesar 50,78%. Berikut data lengkap mengenai jumlah penduduk Kota Solo berdasarkan usia dan jenis kelamin:

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Kota Solo Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	17.413	16.696	34.109
5-9	17.550	17.024	34.574
10-14	18.803	18.096	36.899
15-19	20.659	19.675	40.334
20-24	20.925	20.365	41.290
25-29	19.920	19.595	39.515
30-34	19.106	18.664	37.770
35-39	19.059	18.809	37.868
40-44	19.718	19.974	39.692
45-49	19.089	19.632	38.721
50-54	17.342	18.343	35.685
55-59	15.358	17.137	32.495
60-64	12.658	14.774	27.432
65-69	10.052	12.206	22.258
70-74	6.597	8.466	15.063
>75	5.056	8.109	13.165
Jumlah	259.305	267.565	526.870

Sumber: BPS Kota Surakarta 2023

Dari data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa penduduk pada rentang usia 20-24 tahun menjadi penduduk paling dominan di Kota Solo dengan jumlah 41.290 jiwa. Jumlah ini terdiri dari 20.925 penduduk laki-laki dan 20.365 jiwa penduduk perempuan. Adapun penduduk pada rentang usia 75 tahun keatas menjadi penduduk minoritas di Kota Solo dengan jumlah 13.165 jiwa. Jumlah ini terdiri dari 5.065 penduduk laki-laki dan 8.109 penduduk perempuan.

Berdasarkan data dari sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, penduduk di Indonesia saat ini memang didominasi oleh Generasi Z kelahiran 1997-2012 (Ranier, 2023). Dalam data yang dirilis Badan Pusat Statistik, dari populasi penduduk Indonesia di tahun 2023 yang berjumlah 278,8 juta jiwa, populasi gen z memiliki persentase sebesar 27,94%, milenial 25,87%, gen x 21,87%, baby boomer 11,56%, post gen z 10,08%, dan pre-boomer 2,68%. Fakta tersebut selaras dengan kondisi di Kota Solo, dimana

penduduk dengan rentang usia 20-24 tahun menjadi penduduk yang paling dominan.

Jika dibandingkan dengan kota lain di Jawa Tengah, jumlah penduduk di Kota Solo terbilang cukup banyak. Dengan jumlah penduduk sebanyak 526.870 jiwa, Kota Solo menjadi kota dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Kota Semarang yang memiliki penduduk berjumlah 1.694.743 jiwa. Jumlah penduduk di Kota Solo jauh lebih banyak dibandingkan penduduk di Kota Pekalongan yang berjumlah 317.524 jiwa, Kota Tegal yang berjumlah 282.781 jiwa, Kota Salatiga yang berjumlah 198.920 jiwa, hingga Kota Magelang yang berjumlah 122.150 jiwa (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024).

Tingginya jumlah penduduk di Kota Solo dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Umumnya, laju pertumbuhan penduduk di setiap wilayah akan selalu meningkat setiap tahun karena angka kelahiran dan kedatangan penduduk baru yang tidak sebanding dengan angka kematian ataupun kepindahan pada suatu wilayah (Mardiansjah, Handayani, & Setyono, 2018). Berikut data mengenai laju pertumbuhan penduduk beserta dengan jumlah kelahiran, kematian, kedatangan, serta kepindahan penduduk di Kota Solo pada tahun 2023:

Tabel 2. 4 Laju Pertumbuhan Penduduk Tiap Kecamatan di Kota Solo

Data Pertumbuhan Penduduk	Kecamatan					Solo
	Laweyan	Serengan	Pasar Kliwon	Jebres	Banjarsari	
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,10	0,32	0,36	0,07	0,40	0,25
Kelahiran	6.173	3.908	7.488	8.372	8.765	34.706
Kematian	1.533	905	1.282	2.236	2.770	8.726
Kedatangan	515	216	428	658	947	2.764
Kepindahan	670	325	528	815	1.261	3.599

Sumber: BPS Kota Surakarta 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kota Solo pada tahun 2023 adalah 0,25%. Angka ini diperoleh berdasarkan jumlah perhitungan yang melibatkan angka kelahiran, kematian, kedatangan, dan perpindahan penduduk di Kota Solo pada tahun 2023. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,25% dan jumlah penduduk mencapai 526.870 jiwa, maka pertumbuhan penduduk di Kota Solo setiap tahunnya diperkirakan mencapai 1.313 jiwa.

Selain memiliki jumlah penduduk yang banyak, Kota Solo juga memiliki angka kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Sebagai kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Provinsi Jawa Tengah, Kota Solo memiliki angka kepadatan penduduk sebesar 11.277 jiwa/km² pada tahun 2023. Angka ini jadi yang paling besar di Jawa Tengah, bahkan jika dibandingkan dengan Kota Semarang sekalipun (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024). Berikut data kepadatan penduduk di Kota Solo pada tahun 2023:

Tabel 2. 5 Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan di Kota Solo

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa /km ²)
1.	Laweyan	88.879	9,13	9.734
2.	Serengan	48.295	3,08	15.680
3.	Pasar Kliwon	79.461	4,88	16.282
4.	Jebres	139.232	14,38	9.682
5.	Banjarsari	171.003	15,26	11.205
Jumlah		526.870	46,72	11.277

Sumber: BPS Kota Surakarta 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa Kecamatan Pasar Kliwon menjadi kecamatan terpadat di Kota Solo dengan kepadatan penduduk sebesar 16.282 jiwa/km². Pusat pemerintahan yang terletak di Kecamatan Pasar Kliwon menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi

tingginya kepadatan penduduk di kecamatan ini. Selain itu, luas wilayah Kecamatan Pasar Kliwon yang hanya mencapai 4,88 km² tidak sebanding dengan jumlah penduduknya yang mencapai 79.461 jiwa. Adapun kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah di Kota Solo adalah Kecamatan Jebres dengan kepadatan penduduk sebesar 9.682 jiwa/km². Meski jumlah penduduknya termasuk yang paling banyak di Kota Solo, namun luas wilayahnya yang besar menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya kepadatan penduduk di kecamatan ini.

2.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi

a. Pekerjaan dan Tingkat Pendapatan Masyarakat

Kota Solo merupakan kota dengan karakteristik wilayah yang heterogen, dimana suku, budaya, agama, pekerjaan, hingga tingkat pendidikan penduduknya sangat beragam. Dalam kehidupan sehari-hari, penduduk Kota Solo terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan, mulai dari sektor formal seperti pegawai negeri maupun karyawan swasta, hingga sektor informal seperti pedagang dan buruh harian lepas. Selain itu, ada juga masyarakat yang belum ataupun tidak bekerja. Tingkat pendapatan masyarakat di Kota Solo pun juga sangat beragam tergantung pada jenis pekerjaan, pendidikan, dan peluang ekonomi yang ada di wilayah ini (BPS Kota Surakarta, 2023). Berikut data jumlah penduduk Kota Solo berdasarkan jenis pekerjaannya pada tahun 2023:

Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Kota Solo Berdasarkan Jenis Pekerjaannya

Pekerjaan	Jumlah Penduduk (jiwa)					
	Lawe- yan	Seren- gan	Pasar Kliwon	Jebres	Banjar s-ari	Jumlah
Belum/Tidak Bekerja	17.642	9.277	16.690	28.027	35.109	106.745
Mengurus Rumah Tangga	9.065	5.037	9.765	14.020	19.254	57.141
Pelajar/ Mahasiswa	19.037	10.055	16.508	27.476	34.939	108.015
Pensiunan	1.350	511	580	1.517	2.479	6.437
PNS	1.493	516	572	1.810	2.872	7.263
TNI	204	24	63	139	342	772
POLRI	168	33	31	97	478	807
Pengajar	1.217	493	699	1.378	1.881	5.668
Petani/ Pekebun/ Peternak	53	36	79	69	153	390
Nelayan/ Perikanan	-	-	-	3	3	6
Kesehatan	506	159	174	487	769	2.095
Keagamaan	53	32	39	97	119	340
Perdagangan	782	540	1.215	1.072	1.487	5.096
Wiraswasta	7.234	4.940	7.922	9.607	12.842	42.545
Karyawan Swasta/BUM N/BUMD/ Honorer	26.041	13.822	19.618	47.363	50.719	157.563
Buruh Harian Lepas	2.506	2.028	4.259	4.469	4.719	17.981
Lainnya	1.528	792	1.247	1.601	2.838	8.006
Jumlah	88.879	48.295	79.461	139.232	171.003	526.870

Sumber: BPS Kota Surakarta 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk di Kota Solo adalah karyawan, baik itu yang berstatus sebagai karyawan tetap maupun karyawan honorer. Dari total 526.870 orang penduduk di Kota Solo, ada 157.563 orang yang menggantungkan hidupnya melalui pekerjaan ini. Jika dipersentasekan, ada 29,91% penduduk di Kota Solo yang bekerja sebagai karyawan, baik karyawan pada perusahaan swasta, perusahaan BUMN, ataupun perusahaan BUMD. Kecamatan Banjarsari

jadi kecamatan dengan penduduk terbanyak yang bekerja pada bidang ini dengan total 50.719 penduduk dari 157.563 orang. Adapun Kecamatan Serengan menjadi kecamatan yang penduduknya paling sedikit bekerja sebagai karyawan dengan total 13.822 penduduk dari 157.563 orang.

Jika karyawan menjadi jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk di Kota Solo, maka nelayan adalah pekerjaan yang paling sedikit dilakukan oleh penduduk di Kota Solo. Berdasarkan data pada tabel diatas, total hanya ada 6 orang penduduk yang menggantungkan hidupnya pada jenis pekerjaan ini. Jika dipresentasikan, hampir tidak sampai 0,01% penduduk Kota Solo yang bekerja sebagai nelayan. Adapun penduduk yang bekerja sebagai nelayan terdiri dari 3 orang penduduk di Kecamatan Jebres, dan 3 orang penduduk di Kecamatan Banjarsari. Wilayah Kota Solo yang tidak berbatasan langsung dengan laut tentu menjadi faktor utama yang menyebabkan sedikitnya jumlah penduduk dengan profesi nelayan di kota ini.

Sementara itu, jumlah penduduk yang belum ataupun tidak bekerja di Kota Solo cukup banyak. Berdasarkan data pada tabel diatas, jumlah pengangguran di Kota Solo mencapai 106.745 orang. Jika dipersentasekan, ada 20,26% dari total 526.870 penduduk Kota Solo yang belum ataupun tidak bekerja. Kecamatan Banjarsari menjadi kecamatan dengan pengangguran terbanyak mencapai 35.109 orang. Adapun Kecamatan Serengan menjadi kecamatan dengan jumlah pengangguran paling sedikit mencapai 9.277 orang. Jumlah ini bukan termasuk penduduk yang sedang sekolah maupun mengurus rumah tangga. Meski begitu, data ini tidak merepresentasikan seluruh penduduk dengan usia produktif saja, melainkan juga termasuk penduduk berusia anak-anak, remaja, bahkan juga lansia yang sejatinya memang belum ataupun sudah melewati fase bekerja.

Sejak awal tahun 2025, Kota Solo memiliki UMK sebesar Rp 2.416.560, atau 6,5% lebih besar dibandingkan tahun 2024 yang hanya berjumlah Rp 2.269.070. UMK merupakan upah minimum kota/kabupaten, dimana setiap kota maupun kabupaten memiliki nilai UMK yang berbeda beda sesuai dengan kondisi ekonomi dan biaya hidup di setiap wilayah (Idris, 2024). Berikut tabel perbandingan UMK Kota Solo dari tahun ke tahun:

Tabel 2. 7 Perbandingan UMK Kota Solo dari Tahun ke Tahun

Tahun	Nilai UMK	Jumlah Kenaikan (Rp)	Jumlah Kenaikan (%)
2001	Rp 245.000	-	-
2002	Rp 333.300	Rp 88.300	36,03
2003	Rp 378.000	Rp 44.700	13,41
2004	Rp 407.000	Rp 29.000	7,67
2005	Rp 427.000	Rp 20.000	4,92
2006	Rp 510.000	Rp 83.000	19,44
2007	Rp 590.000	Rp 80.000	15,69
2008	Rp 674.300	Rp 84.300	14,28
2009	Rp 723.000	Rp 48.700	7,22
2010	Rp 785.000	Rp 62.000	8,57
2011	Rp 826.252	Rp 41.252	5,26
2012	Rp 864.450	Rp 38.198	4,63
2013	Rp 915.900	Rp 51.450	5,94
2014	Rp 1.145.000	Rp 229.100	25
2015	Rp 1.222.400	Rp 77.400	6,76
2016	Rp 1.418.000	Rp 195.600	16
2017	Rp 1.534.985	Rp 116.985	8,24
2018	Rp 1.668.700	Rp 133.715	8,72
2019	Rp 1.802.700	Rp 134.000	8,04
2020	Rp 1.956.200	Rp 153.500	8,51
2021	Rp 2.013.810	Rp 57.610	2,95
2022	Rp 2.035.720	Rp 21.910	1,09
2023	Rp 2.174.169	Rp 138.449	6,8
2024	Rp 2.269.070	Rp 94.901	4,36
2025	Rp 2.416.560	Rp 147.490	6,5

Sumber: www.kompas.com

Dari tabel data diatas, dapat diketahui bahwa nilai UMK di Kota Solo selalu naik sejak tahun 2001. Kenaikan ini secara umum juga terjadi di wilayah lain seiring dengan naiknya biaya hidup. Kenaikan UMK di Kota Solo yang paling signifikan terjadi pada tahun 2002 dengan kenaikan mencapai 36,03%. Adapun kenaikan UMK di Kota Solo yang paling kecil terjadi pada tahun 2022 dengan persentase kenaikan yang hanya mencapai 1,09%. Nilai UMK yang ditetapkan pemerintah menjadi patokan bagi setiap instansi ataupun perusahaan untuk

memberikan upah minimum bagi setiap pekerja. Meski begitu, penghasilan setiap pekerja bisa saja lebih besar ataupun lebih kecil tergantung pada jenis pekerjaan dan kebijakan skala upah di masing masing instansi.

b. Tingkat Pendidikan dan Kondisi Kesehatan Masyarakat

Penduduk yang cerdas dan sehat merupakan aspek penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah. Semakin banyak masyarakat yang hidup dengan sejahtera, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusia yang tersedia (Yanuar, Ahmad, & Tjahjono, 2024). Kota Solo memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang beragam, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga perguruan tinggi. Keberagaman ini mencerminkan variasi latar belakang sosial dan ekonomi masyarakat yang turut memengaruhi pola pikir, keterampilan, serta peluang kerja yang tersedia di Kota Solo. Berikut data jumlah penduduk Kota Solo berdasarkan tingkat pendidikannya pada tahun 2023:

Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Kota Solo Berdasarkan Tingkat Pendidikannya

Pendidikan	Jumlah Penduduk (jiwa)					Jumlah
	Lawe-yan	Seren-gan	Pasar Kliwo-n	Jebres	Banjars-ari	
Tidak/Belum Sekolah	16.242	8.712	15.502	26.871	34.649	101.976
Belum Tamat SD/Sederajat	9.447	4.868	8.708	14.229	18.502	55.754
Tamat SD/Sederajat	8.879	6.172	11.227	21.065	21.837	69.180
SMP/ Sederajat	10.781	6.548	12.316	20.063	22.965	72.673
SMA/ Sederajat	26.459	14.603	23.375	39.171	47.795	151.403
D1/D2	666	260	413	696	923	2.958
Akademi/D3/ Sarjana Muda	4.221	2.038	2.352	5.332	6.686	20.629
D4/S1	10.887	4.713	5.164	10.832	15.988	47.584
S2	1.235	362	389	932	1.573	4.491
S3	62	19	15	41	85	222
Jumlah	88.879	48.295	79.461	139.232	171.003	526.870

Sumber: BPS Kota Surakarta 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kota Solo memiliki pendidikan terakhir di tingkat SMA/ sederajat, baik itu SMA, SMK, maupun MA. Total, ada 151.403 orang dari 526.870 penduduk di Kota Solo, atau jika dipersentasekan, mencapai 28,74%. Kecamatan Banjarsari menjadi kecamatan dengan penduduk terbanyak pada tingkat pendidikan ini mencapai 26.459 penduduk dari 151.403 orang. Adapun Kecamatan Serengan menjadi kecamatan dengan penduduk paling sedikit yang menyelesaikan pendidikan pada tingkat SMA/ sederajat mencapai 14.603 penduduk dari 157.563 orang.

Jika SMA/ sederajat menjadi tingkat pendidikan terakhir yang paling banyak ditempuh oleh penduduk di Kota Solo, maka S3 adalah tingkat pendidikan terakhir yang paling sedikit ditempuh oleh penduduk di Kota Solo. Berdasarkan data pada tabel diatas, total hanya ada 222 orang penduduk yang mampu menyelesaikan jenjang pendidikan pada tingkat S3. Jika dipresentasikan, maka hanya ada 0,04% orang dari 526.870 penduduk di Kota Solo yang menempuh pendidikan ini. Adapun penduduk lulusan S3 di Kota Solo terdiri dari 62 orang di Kecamatan Laweyan, 19 orang di Kecamatan Serengan, 15 orang di Kecamatan Pasar Kliwon, 41 orang di Kecamatan Jebres, serta 85 orang di Kecamatan Banjarsari.

Sementara itu, jumlah penduduk yang belum ataupun tidak sekolah di Kota Solo cukup banyak. Berdasarkan data pada tabel diatas, jumlah penduduk yang belum ataupun tidak sekolah di Kota Solo mencapai 101.976 orang, atau jika dipersentasekan mencapai 19,36% dari total 526.870. Kecamatan Banjarsari menjadi kecamatan dengan masyarakat yang belum ataupun tidak sekolah terbanyak mencapai 34.649 orang. Adapun Kecamatan Serengan

menjadi kecamatan dengan jumlah masyarakat yang belum ataupun tidak sekolah paling sedikit mencapai 8.712 orang. Perlu dipahami, data ini tidak merepresentasikan penduduk yang putus sekolah saja, melainkan juga termasuk penduduk yang memang belum memasuki usia sekolah.

Tingkat pendidikan penduduk tidak hanya berperan dalam membentuk kualitas sumber daya manusia saja, tetapi juga erat kaitannya dengan tingkat kesehatan masyarakat. Tingkat pendidikan yang baik umumnya dapat turut meningkatkan kesadaran individu terhadap pentingnya pola hidup sehat, serta pemahaman mengenai pencegahan penyakit. Oleh karena itu, kualitas kesehatan masyarakat di suatu wilayah seringkali mencerminkan bagaimana pendidikan berkontribusi pada kesejahteraan hidup secara menyeluruh (Yanuar, Ahmad, & Tjahjono, 2024). Untuk itu, memahami tingkat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah menjadi sesuatu yang penting sebagai landasan dalam menilai kesejahteraan masyarakat. Berikut data jumlah kasus penyakit di Kota Solo pada tahun 2023 menurut data BPS Kota Surakarta:

Tabel 2. 9 Jumlah Kasus Penyakit di Kota Solo Pada Tahun 2023

Penyakit	Jumlah Penduduk (jiwa)					
	Laweya -n	Serenga -n	Pasar Kliwo -n	Jebres	Banjars -ari	Jumlah
Malaria (Suspek)	-	-	-	-	-	-
TB Paru	133	73	145	270	271	892
Pneumonia	114	47	124	20	168	473
Kusta	-	1	2	4	2	9
Tetanus Neonatorum	-	-	-	-	-	-
Campak	1	1	2	1	-	5
Diare	746	1.175	417	2.669	2.202	7.209
DBD Dengue	36	8	17	16	22	99
Tidak Tercatat Sakit	87.849	46.990	78.754	136.252	168.338	518.183
Jumlah	88.879	48.295	79.461	139.232	171.003	526.870

Sumber: BPS Kota Surakarta 2023

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 518.183 dari 526.870 penduduk Kota Solo yang tidak tercatat mengalami sakit sepanjang tahun 2023. Jika dipersentasekan, maka ada 98,35% penduduk Kota Solo yang sehat. Adapun penyakit yang paling umum dialami penduduk Kota Solo sepanjang tahun 2023 adalah diare, dimana ada 7.209 orang yang mengalaminya. Sementara itu, malaria dan tetanus neonatorum menjadi penyakit yang sama sekali tidak ditemui pada penduduk di Kota Solo sepanjang tahun 2023.

2.1.4 Kondisi Sosial Politik

Sejak tahun 2004, Indonesia telah mengalami perkembangan demokrasi yang sangat signifikan, dimana kepala negara, kepala daerah, hingga anggota legislatif dapat dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui kontestasi Pemilihan Umum. Kota Solo, sebagai salah satu kota penting di Indonesia turut berperan dalam menentukan Presiden dan Wakil Presiden pada setiap periode kepemimpinan. Pada tahun 2024, Kota Solo memiliki total daftar pemilih tetap sebesar 443.975 orang, dimana jumlah ini terhitung cukup besar meskipun tidak lebih besar dibandingkan dengan beberapa kota metropolitan di Indonesia seperti Jakarta ataupun Surabaya (KPU Kota Surakarta).

Di Indonesia, daftar pemilih tetap pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 mencapai 204.807.222 orang. Jumlah ini tersebar pada 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota madya. Dengan jumlah daftar pemilih tetap mencapai 443.975 dari total 204.807.222 masyarakat se-Indonesia, Kota Solo turut menyumbangkan suara senilai 0,22% dari 100% suara yang diperebutkan pada kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Berikut tabel hasil pemilihan Presiden dan Wakil Ptesiden di Kota Solo pada tahun 2019 dan 2024:

Tabel 2. 10 Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Solo Tahun 2019 dan 2024

Tahun	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Partai Pengusung dan Pendukung	Perolehan Suara di Kota Solo (%)	Perolehan Suara Nasional (%)
2019	Joko Widodo – Ma'ruf Amin	PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, PKB, PPP, PMB, PJK, Hanura, PSI, Perindo, PKPI, PBB	82,33	55,50
	Prabowo Subianto – Sandiaga Uno	Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, Berkarya	17,77	45,50
2024	Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar	NasDem, PKB, PKS	14,91	24,95
	Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka	Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, PSI, Garuda, Partai Aceh, PRIMA	50,84	58,59
	Ganjar Pranowo – Mahfud MD	PDI Perjuangan, PPP, Hanura, Perindo	34,25	16,47

Sumber: KPU Kota Surakarta

Berdasarkan tabel data diatas, dapat diketahui bahwa keluarga Presiden Jokowi selalu mendominasi pada perolehan suara di Pilpres, baik di tingkat Kota Solo maupun di tingkat nasional. Pada Pilpres 2019, Jokowi-Ma'ruf sangat digdaya di Kota Solo dengan memperoleh 82,33% suara. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan perolehan suara di tingkat nasional yang hanya mencapai 55,50% suara. Pada Pilpres 2024, perolehan suara Prabowo-Gibran yang didukung oleh Presiden Jokowi juga berhasil memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, karena beberapa faktor termasuk isu politik dinasti yang semakin berkembang, perolehan suara Prabowo-Gibran di Kota Solo

tidak lebih besar dibandingkan tingkat nasional. Di Kota Solo, mereka hanya meraih 50,84% suara, sedikit lebih rendah dibandingkan 58,59% di tingkat nasional.

Selain dikenal sebagai markas Jokowi, Kota Solo juga dikenal sebagai kandang banteng. Istilah kandang banteng disematkan pada Kota Solo karena adanya kekuatan politik yang sangat besar dari PDI Perjuangan di kota ini. Hal ini bisa dilihat dari perolehan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung PDI Perjuangan pada Pilpres 2019 dan 2024. Pada Pilpres 2019, pasangan Jokowi-Ma'ruf yang diusung oleh PDI Perjuangan berhasil menang di Kota Solo dengan memperoleh 82,33% suara. Kombinasi antara kekuatan pendukung PDI Perjuangan dan pendukung Jokowi turut menjadi salah satu faktor dibalik kesuksesan Jokowi-Ma'ruf di Kota Solo. Sementara itu, pada Pilpres 2024 terjadi perpecahan suara, dimana pendukung Jokowi lebih memilih pasangan Prabowo-Gibran dan pendukung PDI Perjuangan lebih memiliki pasangan Ganjar-Mahfud. Meski pasangan Ganjar-Mahfud kalah dari Prabowo-Gibran yang didukung oleh Presiden Jokowi, namun perolehan suara mereka di Kota Solo tetap lebih besar dibandingkan pasangan Anies-Muhaimin yang tidak diusung PDI Perjuangan.

Selain kuat dalam kontestasi Pilpres, PDI Perjuangan juga memiliki dominasi yang cukup signifikan dalam kontestasi Pilkada Solo. Sejak pilkada pertama yang diselenggarakan di Kota Solo pada tahun 2005, walikota dan wakil walikota terpilih di Kota Solo lebih banyak yang berasal dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan terhitung hanya satu kali mengalami kekalahan dalam pilkada, yakni pada Pilkada 2024. Ini menandakan adanya kepercayaan politik yang begitu besar dari masyarakat Kota Solo terhadap figur-figur yang diusung oleh PDI

Perjuangan (Alauddin & Akbar, 2021). Berikut tabel hasil pemilihan walikota dan wakil walikota solo sejak tahun 2005-2024:

Tabel 2. 11 Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Solo Dari Tahun Ke Tahun

Tahun	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Partai Pengusung dan Pendukung	Perolehan Suara (%)
2005	Joko Widodo-FX Hadi Rudyatmo	PDI Perjuangan	36,62
	Achmad Purnomo-Istar Yuliadi	PAN	29,08
	Hardono-Dipokusumo	Golkar, Demokrat, PKS	29
	Slamet Suryanto-Hengky Nartosabdo	Koalisi Partai-Partai Kecil	5,29
2010	Joko Widodo-FX Hadi Rudyatmo	PDI Perjuangan, PKS, PAN, PDS	90,09
	Eddy Wirabhumi-Supradi	Demokrat, Golkar, Hanura	9,91
2015	FX Hadi Rudyatmo- Achmad Purnomo	PDI Perjuangan	60,39
	Anung Indro Susanto-Muhammad Fajri	PKS, PAN, Gerindra, Demokrat	39.61
2020	Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa	PDI Perjuangan, PAN, Golkar, Gerindra, PSI, PPP, Nasdem, Demokrat, PKB, Hanura, Perindo, PBB, PKPI, Gelora	86,5
	Bagyo Wahyono- Suparjo Fransiskus Xaverius	Independen	13,5
2024	Teguh Prakosa-Bambang Gage Nugroho	PDI Perjuangan, PKN, Buruh, Garuda, PBB	39,51
	<u>Respati Ardi</u> - Astrid Widayani	PKS, PSI, Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Nasdem, Demokrat, PPP, Perindo, Gelora, Hanura	60,49

Sumber: KPU Kota Surakarta

Berdasarkan tabel data diatas, dapat diketahui bahwa kemenangan terbesar PDI Perjuangan pada Pilkada Solo terjadi pada tahun 2010 dan 2020, dimana Joko Widodo-FX Hadi Rudyatmo berhasil menang di Pilkada tahun 2010 dengan perolehan suara 90,09%, serta Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa yang berhasil menang di Pilkada tahun 2020 dengan perolehan suara 86,5%. Adapun kekalahan PDI Perjuangan terjadi satu kali pada tahun 2024, dimana Teguh Prakosa-Bambang Gage Nugroho hanya memperoleh 39,51%, kalah dari Respati Ardi- Astrid Widayani yang diusung oleh gabungan koalisi PKS, PSI, Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Nasdem, Demokrat, PPP, Perindo, Gelora, dan Hanura dengan perolehan 60,49%.

Selain mendominasi pada pemilihan kepala daerah, PDI Perjuangan juga mendominasi pada pemilihan legislatif di Kota Solo. Dalam 4 periode terakhir, PDI Perjuangan selalu mendapatkan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kota Surakarta. Kondisi ini menjadikan Fraksi PDI Perjuangan menjadi fraksi tergemuk di DPRD Kota Surakarta. Berikut data perolehan kursi partai politik pada DPRD Kota Surakarta dalam 4 periode terakhir:

Tabel 2. 12 Perolehan Kursi Partai Politik Pada DPRD Kota Surakarta Dalam 4 Periode Terakhir

Partai Politik	Jumlah Kursi			
	2009-2014	2014-2019	2019-2024	2024-2029
PDI Perjuangan	15	24	30	20
PKB	0	0	0	2
Gerindra	2	3	3	5
Golkar	4	4	3	3
PKS	4	5	5	7
Hanura	2	1	0	0
PAN	4	4	3	3
Demokrat	7	3	0	0
PSI	-	-	1	5
PPP	0	1	0	0
PDS	2	-	-	-
Jumlah Anggota	40	45	45	45
Jumlah Partai	8	8	6	7

Sumber: KPU Kota Surakarta

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa perolehan kursi legislatif di Kota Solo juga masih di dominasi PDI Perjuangan. Situasi ini menunjukan bahwa kepercayaan masyarakat Kota Solo terhadap figur walikota dan wakil walikota yang berasal dari PDI Perjuangan juga sejalan dengan kepercayaan mereka terhadap figur legislatif yang berasal dari PDI Perjuangan.

Periode 2019-2024 merupakan masa kejayaan bagi PDI Perjuangan di Kota Solo, dengan mengamankan 30 dari 45 kursi di parlemen. Jumlah tersebut menunjukkan dominasi PDI Perjuangan dalam peta politik di Kota Solo pada periode waktu tersebut. Adapun pada pemilihan legislatif 2024, PDI Perjuangan mengalami penurunan jumlah suara yang cukup signifikan di Kota Solo yang mengakibatkan penurunan jumlah kursi di parlemen, dari yang semula 30 kursi menjadi 20 kursi. Meski penurunan ini terbilang cukup signifikan, PDI Perjuangan tetap menjadi menjadi partai dengan anggota legislatif terbanyak di Kota Solo pada periode waktu tersebut.

2.2 Kota Semarang

2.2.1 Kondisi Geografis

Kota Semarang merupakan wilayah otonom setingkat kota yang berstatus sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Kota ini terletak di bagian utara Provinsi Jawa Tengah dengan posisi astronomisnya berkisar antara 109°35' dan 110°50' bujur timur, serta 6°50' dan 7°40' lintang selatan (BPS Kota Semarang, 2024). Dengan posisi astronomis tersebut, Kota Semarang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di bagian utara, Kabupaten Kendal di bagian barat, Kabupaten Semarang di bagian Selatan, serta Kabupaten Demak di bagian timur.

Gambar 2. 3 Wilayah Kota Semarang dilihat dari Peta Jawa Tengah



Sumber: www.lamudi.co.id/journal/peta-jawa-tengah

Berdasarkan data yang diperoleh dari laman BPS Kota Semarang, luas wilayah Kota Semarang mencapai 373,78 km². Angka tersebut terhitung sangat luas bagi sebuah kota madya, sehingga menempatkan Kota Semarang menjadi kota dengan luas wilayah terbesar di Jawa Tengah (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024). Dari luas wilayah tersebut, Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Genuk, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Candisari, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Mijen, Kecamatan Ngaliyan, Serta Kecamatan Tugu. Adapun luas wilayah Kota Semarang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

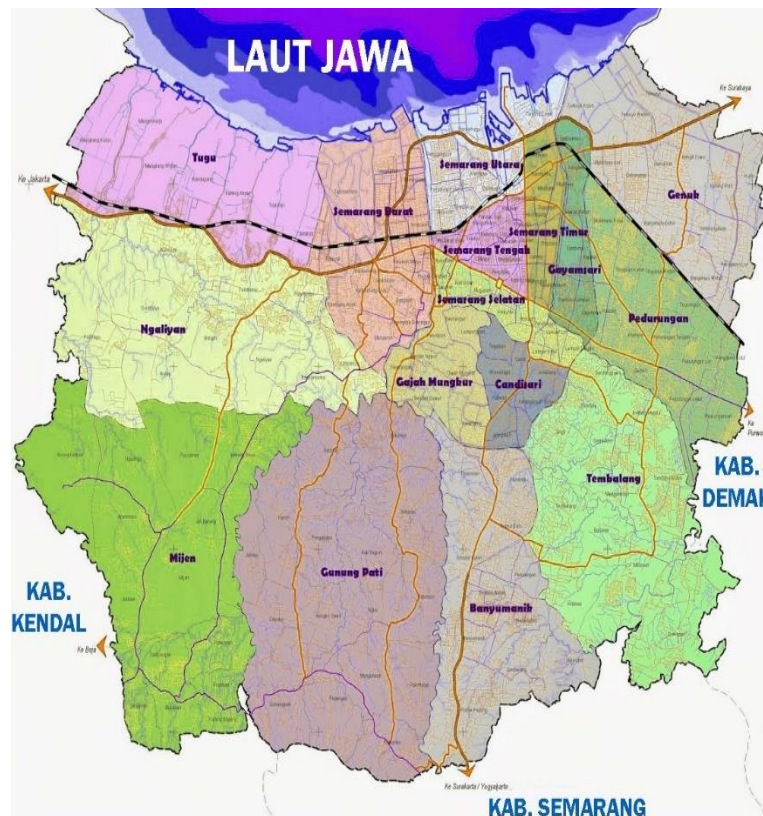
Tabel 2. 13 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kota Semarang

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1.	Semarang Tengah	5,17
2.	Semarang Utara	11,39
3.	Semarang Timur	5,42
4.	Gayamsari	6,22
5.	Genuk	25,98
6.	Pedurungan	21,11
7.	Semarang Selatan	5,95
8.	Candisari	6,40
9.	Gajahmungkur	9,34
10.	Tembalang	39,47
11.	Banyumanik	29,74
12.	Gunungpati	58,27
13.	Semarang Barat	21,68
14.	Mijen	56,52
15.	Ngaliyan	42,99
16.	Tugu	28,13
Jumlah		373,78

Sumber: BPS Kota Semarang 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa Kecamatan Gunungpati menjadi kecamatan dengan wilayah paling luas di Kota Semarang. Kecamatan Gunungpati memiliki luas wilayah mencapai 58,27 km², atau jika dipersentasekan sebesar 15,59% dari total keseluruhan luas wilayah Kota Semarang. Kecamatan Gunungpati terletak di bagian selatan Kota Semarang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang. Adapun kecamatan dengan luas wilayah terkecil di Kota Semarang adalah Kecamatan Semarang Tengah. Kecamatan Semarang Tengah hanya memiliki luas wilayah sebesar 5,17 km², atau jika dipersentasekan sebesar 1,38% dari total keseluruhan luas wilayah Kota Semarang. Kecamatan Semarang Tengah terletak di sisi tengah Kota Semarang dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Selatan, serta Kecamatan Semarang Timur.

Gambar 2. 4 Peta Wilayah Kota Semarang Berdasarkan Kecamatan



Sumber: www.sejarah-negara.com

Pusat pemerintahan Kota Semarang terletak di Kecamatan Semarang Tengah. Berbagai gedung pemerintahan seperti kantor Walikota dan Wakil Walikota, kantor DPRD, hingga kantor dinas dan lembaga di bawah Pemerintah Kota Semarang berada di Kecamatan Semarang Tengah. Sebagai sebuah kota dengan luas wilayah 373,78 km², Kota Semarang memiliki konektivitas yang cukup baik antar wilayahnya. Hampir setiap wilayah di Kota Semarang memiliki jarak yang tidak begitu jauh dengan pusat pemerintahan, kecuali beberapa kecamatan yang terletak di ujung perbatasan. Adapun jarak antara kecamatan di Kota Semarang dengan pusat pemerintahan dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 2. 14 Jarak antara Kecamatan dengan Pusat Pemerintahan di Kota Semarang

No.	Kecamatan	Jarak Menuju Pusat Pemerintahan (km)
1.	Semarang Tengah	0,5
2.	Semarang Utara	5
3.	Semarang Timur	2,5
4.	Gayamsari	5
5.	Genuk	7
6.	Pedurungan	8
7.	Semarang Selatan	1
8.	Candisari	9
9.	Gajahmungkur	7
10.	Tembalang	15
11.	Banyumanik	10
12.	Gunungpati	17
13.	Semarang Barat	4
14.	Mijen	20
15.	Ngaliyan	9
16.	Tugu	12

Sumber: BPS Kota Semarang 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa Kecamatan Semarang Tengah menjadi kecamatan dengan jarak paling dekat dengan pusat pemerintahan. Hal ini tentu tidak terlepas dari keberadaan gedung-gedung pemerintahan yang terletak di Kecamatan Semarang Tengah. Adapun kecamatan dengan jarak paling jauh dengan pusat pemerintahan adalah Kecamatan Mijen. Kecamatan Mijen merupakan kecamatan yang berada di ujung barat daya Kota Semarang, sehingga memiliki jarak yang paling jauh dengan pusat pemerintahan.

2.2.2 Kondisi Demografis

Pada tahun 2023, Kota Semarang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.694.743 jiwa. Jumlah ini mencakup 838.437 penduduk laki-laki dan 856.306 penduduk perempuan dengan rentang usia mulai dari 0-75 tahun keatas (BPS Kota Semarang, 2024). Berdasarkan angka tersebut, dapat diketahui bahwa rasio jenis kelamin di Kota Semarang mencapai 97,91, dengan persentase penduduk

laki-laki sebesar 49,47% dan persentase penduduk perempuan sebesar 50,53%. Berikut data lengkap mengenai jumlah penduduk Kota Semarang berdasarkan usia dan jenis kelamin:

Tabel 2. 15 Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	58.283	55.856	114.139
5-9	61.668	58.657	120.325
10-14	64.069	60.588	124.657
15-19	66.362	62.598	128.960
20-24	66.326	63.127	129.453
25-29	64.287	63.338	127.625
30-34	65.092	65.768	130.860
35-39	66.058	67.252	133.310
40-44	66.632	68.567	135.199
45-49	62.767	65.733	128.500
50-54	54.656	58.675	113.331
55-59	46.880	51.968	98.848
60-64	38.221	42.922	81.143
65-69	28.671	32.672	61.343
70-74	17.020	20.597	37.617
>75	11.445	17.988	29.433
Jumlah	838.437	856.306	1.694.743

Sumber: BPS Kota Semarang 2023

Dari data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa penduduk pada rentang usia 40-44 tahun menjadi penduduk paling dominan di Kota Semarang dengan jumlah 135.199 jiwa. Jumlah ini terdiri dari 66.632 penduduk laki-laki dan 68.567 jiwa penduduk perempuan. Adapun penduduk pada rentang usia 75 tahun keatas menjadi penduduk minoritas di Kota Solo dengan jumlah 29.433 jiwa. Jumlah ini terdiri dari 11.445 penduduk laki-laki dan 17.988 penduduk perempuan.

Jika dibandingkan dengan kota lain di Jawa Tengah, jumlah penduduk di Kota Semarang terbilang sangat banyak. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.694.743 jiwa, Kota Semarang menjadi kota dengan jumlah penduduk terbanyak

nomor satu di Jawa Tengah. Jumlah penduduk di Kota Semarang jauh lebih banyak dibandingkan penduduk di Kota Solo yang berjumlah 526.870, Kota Pekalongan yang berjumlah 317.524 jiwa, Kota Tegal yang berjumlah 282.781 jiwa, Kota Salatiga yang berjumlah 198.920 jiwa, hingga Kota Magelang yang berjumlah 122.150 jiwa (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024).

Tingginya jumlah penduduk di Kota Semarang dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Umumnya, laju pertumbuhan penduduk di setiap wilayah akan selalu meningkat setiap tahun karena angka kelahiran dan kedatangan penduduk baru yang tidak sebanding dengan angka kematian ataupun kepindahan pada suatu wilayah. Berikut data mengenai laju pertumbuhan penduduk di Kota Semarang pada tahun 2023:

Tabel 2. 16 Laju Pertumbuhan Penduduk Tiap Kecamatan di Kota Semarang

No.	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	No.	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1.	Semarang Tengah	0,13	9.	Gajahmungkur	0,10
2.	Semarang Utara	0,11	10.	Tembalang	1,62
3.	Semarang Timur	0,12	11.	Banyumanik	0,35
4.	Gayamsari	0,11	12.	Gunungpati	0,95
5.	Genuk	2,45	13.	Semarang Barat	0,13
6.	Pedurungan	0,61	14.	Mijen	3,63
7.	Semarang Selatan	0,11	15.	Ngaliyan	0,91
8.	Candisari	0,10	16.	Tugu	1,01
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang 0,87%					

Sumber: BPS Kota Semarang 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kota Semarang pada tahun 2023 adalah 0,87%. Angka

ini diperoleh berdasarkan jumlah perhitungan yang melibatkan angka kelahiran, kematian, kedatangan, dan perpindahan penduduk di Kota Semarang pada tahun 2023. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,87% dan jumlah penduduk mencapai 1.694.743 jiwa, maka pertumbuhan penduduk di Kota Semarang setiap tahunnya diperkirakan mencapai 14.744 jiwa.

Meskipun memiliki jumlah penduduk yang banyak, Kota Semarang memiliki angka kepadatan penduduk yang cukup rendah dibandingkan kota lainnya. Sebagai kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang hanya memiliki angka kepadatan penduduk sebesar 4.534 jiwa/km². Angka ini jadi yang paling kecil kedua di Jawa Tengah setelah Kota Salatiga (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024). Berikut data kepadatan penduduk di Kota Semarang pada tahun 2023:

Tabel 2. 17 Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan di Kota Semarang

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1.	Semarang Tengah	55.248	5,17	10.672
2.	Semarang Utara	117.954	11,39	10.348
3.	Semarang Timur	66.433	5,42	12.262
4.	Gayamsari	70.331	6,22	11.320
5.	Genuk	132.528	25,98	5.099
6.	Pedurungan	196.590	21,11	9.310
7.	Semarang Selatan	62.197	5,95	10.457
8.	Candisari	75.585	6,40	11.820
9.	Gajahmungkur	56.265	9,34	6.031
10.	Tembalang	198.971	39,47	5.038
11.	Banyumanik	143.375	29,74	4.823
12.	Gunungpati	100.667	58,27	1.729
13.	Semarang Barat	149.306	21,68	6.889
14.	Mijen	89.990	56,52	1.591
15.	Ngaliyan	145.578	42,99	3.385
16.	Tugu	33.725	28,13	1.202
Kota Semarang		1.694.743	373,78	4.534

Sumber: BPS Kota Semarang 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa Kecamatan Semarang Timur menjadi kecamatan terpadat di Kota Semarang dengan kepadatan penduduk sebesar 12.262 jiwa/km². Luas wilayah Kecamatan Semarang Timur yang hanya mencapai 5,42 km² tidak sebanding dengan jumlah penduduknya yang mencapai 66.433 jiwa. Adapun kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah di Kota Semarang adalah Kecamatan Tugu dengan kepadatan penduduk sebesar 1.202 jiwa/km². Rendahnya kepadatan penduduk di Kecamatan Tugu disebabkan oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit dibandingkan dengan luas wilayahnya.

2.2.3 Kondisi Sosial Ekonomi

a. Pekerjaan dan Tingkat Pendapatan Masyarakat

Kota Semarang merupakan kota dengan karakteristik wilayah yang heterogen, dimana suku, budaya, agama, pekerjaan, hingga tingkat pendidikan penduduknya sangat beragam. Dalam kehidupan sehari-hari, penduduk Kota Semarang terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan, mulai dari sektor formal seperti pegawai negeri maupun karyawan swasta, hingga sektor informal seperti pedagang dan buruh harian lepas. Selain itu, ada juga masyarakat yang belum ataupun tidak bekerja. Tingkat pendapatan masyarakat di Kota Semarang pun juga sangat beragam tergantung pada jenis pekerjaan, pendidikan, dan peluang ekonomi yang ada di wilayah ini (BPS Kota Semarang, 2023). Berikut data jumlah penduduk Kota Semarang berdasarkan jenis pekerjaannya pada tahun 2023:

Tabel 2. 18 Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Jenis Pekerjaannya

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1	Tidak Bekerja (Bukan Angkatan Kerja)	765.729
2	Tidak Bekerja (Angkatan Kerja)	55.656
3	Petani/Nelayan	61.047
4	Pengusaha	63.056
5	Buruh	320.260
6	Pedagang	107.859
7	Angkutan	33.711
8	PNS & TNI/Polri	120.261
9	Pensiunan	50.392
10	Lainnya	116.772
Total		1.694.743

Sumber: BPS Kota Semarang 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk di Kota Semarang adalah buruh. Dari total 1.694.743 orang penduduk di Kota Semarang, ada 320.260 orang yang menggantungkan hidupnya melalui pekerjaan ini. Jika dipersentasekan, maka ada 18,90% penduduk di Kota Semarang yang bekerja sebagai buruh, baik itu buruh industri maupun buruh bangunan. Adapun angkutan menjadi bidang pekerjaan yang paling sedikit dilakukan oleh penduduk di Kota Semarang. Berdasarkan data pada tabel diatas, total hanya ada 33.711 orang penduduk yang menggantungkan hidupnya pada jenis pekerjaan ini. Jika dipresentasikan, hampir tidak sampai 2% penduduk Kota Semarang yang bekerja pada bidang angkutan.

Sementara itu, jumlah penduduk yang belum ataupun tidak bekerja di Kota Semarang mencapai 821.385 orang. Jumlah ini terdiri dari 765.729 orang penduduk bukan angkatan kerja, serta 55.656 orang penduduk angkatan kerja. Penduduk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang belum berusia produktif yang umumnya masih berstatus sebagai pelajar. Adapun penduduk angkatan kerja merupakan penduduk dengan usia produktif yang siap untuk bekerja. Jika dipersentasekan, ada 45,18% dari total 1.694.743 penduduk Kota Semarang yang

termasuk ke dalam penduduk bukan angkatan kerja, serta ada 3,28% dari total 1.694.743 penduduk Kota Semarang yang termasuk ke dalam penduduk Angkatan kerja yang belum bekerja.

Sejak awal tahun 2025, Kota Semarang memiliki UMK sebesar Rp 3.454.827, atau 6,5% lebih besar dibandingkan tahun 2024 yang hanya berjumlah sebesar Rp 3.243.969. UMK merupakan upah minimum kota/kabupaten, dimana setiap kota maupun kabupaten memiliki nilai UMK yang berbeda beda sesuai dengan kondisi ekonomi dan biaya hidup di setiap wilayah (Azizah, 2024). Berikut tabel perbandingan UMK Kota Semarang dari tahun ke tahun:

Tabel 2. 19 Perbandingan UMK Kota Semarang dari Tahun ke Tahun

Tahun	Nilai UMK	Jumlah Kenaikan (Rp)	Jumlah Kenaikan (%)
2000	Rp 185.500	-	-
2001	Rp 253.000	Rp 67.500	36,36
2002	Rp 342.250	Rp 89,250	35,31
2003	Rp 400.000	Rp 57.750	16,88
2004	Rp 440.000	Rp 40.000	10
2005	Rp 473.600	Rp 33.600	7,61
2006	Rp 586.000	Rp 112.400	23,77
2007	Rp 650.000	Rp 64.000	10,93
2008	Rp 715.700	Rp 65.700	10,12
2009	Rp 838.500	Rp 122.800	17,15
2010	Rp 939.756	Rp 101.256	12,06
2011	Rp 961.320	Rp 21.564	2,3
2012	Rp 991.500	Rp 30.180	3,14
2013	Rp 1.209.100	Rp 217.600	21,98
2014	Rp 1.435.000	Rp 225.900	18,7
2015	Rp 1.685.000	Rp 250.000	17,48
2016	Rp 1.909.000	Rp 224.000	13,29
2017	Rp 2.125.000	Rp 216.000	11,32
2018	Rp 2.310.087,50	Rp 185.087,50	8,71
2019	Rp 2.498.587,53	Rp 188.500,03	8,14
2020	Rp 2.715.000	Rp 216.412,47	8,67
2021	Rp 2.810.025	Rp 95.025	3,5
2022	Rp 2.835.021	Rp 24.996	0,89
2023	Rp 3.060.349	Rp 225.328	7,96
2024	Rp 3.243.969	Rp 183.620	6
2025	Rp 3.454.827	Rp 210.858	6,5

Sumber: www.detik.com

Dari tabel data diatas, dapat diketahui bahwa nilai UMK di Kota Semarang selalu naik sejak tahun 2000. Kenaikan ini secara umum juga terjadi

di wilayah lain seiring dengan naiknya biaya hidup. Kenaikan UMK di Kota Semarang yang paling signifikan terjadi pada tahun 2001 dengan kenaikan mencapai 36,36%. Adapun kenaikan UMK di Kota Semarang yang paling kecil terjadi pada tahun 2022 dengan persentase kenaikan yang hanya mencapai 0,89%. Nilai UMK yang ditetapkan pemerintah menjadi patokan bagi setiap instansi ataupun perusahaan untuk memberikan upah minimum bagi setiap pekerja. Meski begitu, penghasilan setiap pekerja bisa saja lebih besar ataupun lebih kecil tergantung pada jenis pekerjaan dan kebijakan skala upah di masing masing instansi.

b. Tingkat Pendidikan dan Kondisi Kesehatan Masyarakat

Penduduk yang cerdas dan sehat merupakan aspek penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah. Semakin banyak masyarakat yang hidup dengan sejahtera, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Kota Semarang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang beragam mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Berikut data jumlah penduduk Kota Semarang berdasarkan tingkat pendidikannya pada tahun 2023:

Tabel 2. 20 Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Tingkat Pendidikannya

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	21.862
2	Tidak Tamat SD	86.262
3	SD/MI	229.976
4	SMP/MTS	362.166
5	SMA/SMK/MA	685.184
6	Perguruan Tinggi (D3/D4/S1/S2/S3)	309.293
Total		1.694.743

Sumber: BPS Kota Semarang 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kota Semarang memiliki pendidikan terakhir di tingkat SMA/ sederajat, baik itu SMA, SMK, maupun MA. Total, ada 685.184 orang dari 1.694.743 penduduk di Kota Semarang, atau jika dipersentasekan, mencapai 40,43%. Adapun masyarakat yang tidak ataupun belum sekolah di Kota Semarang menjadi yang paling sedikit dengan jumlah 21.862 orang dari 1.694.743 penduduk, atau jika dipersentasekan mencapai 1,29%.

Tingkat pendidikan penduduk tidak hanya berperan dalam membentuk kualitas sumber daya manusia saja, tetapi juga erat kaitannya dengan tingkat kesehatan masyarakat. Tingkat pendidikan yang baik umumnya dapat turut meningkatkan kesadaran individu terhadap pentingnya pola hidup sehat, serta pemahaman mengenai pencegahan penyakit. Oleh karena itu, kualitas kesehatan masyarakat di suatu wilayah seringkali mencerminkan bagaimana pendidikan berkontribusi pada kesejahteraan hidup secara menyeluruh. Untuk itu, memahami tingkat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah menjadi sesuatu yang penting sebagai landasan dalam menilai kesejahteraan masyarakat. Berikut data jumlah kasus penyakit di Kota Semarang pada tahun 2023 menurut data BPS Kota Semarang:

Tabel 2. 21 Jumlah Kasus Penyakit di Kota Semarang Pada Tahun 2023

No.	Penyakit	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	TB Paru	2.718	2.321	5.039
2	Pneumonia	1.519	1.196	2.715
3	HIV	533	156	7.006
4	AIDS	19	8	27
5	Diare	18.200	18.334	36.534
6	Kusta	5	5	10
7	Tidak Tercatat Sakit	815.443	834.286	1.643.412
Total		838.437	856.306	1.694.743

Sumber: BPS Kota Semarang 2023

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa 1.643.412 dari 1.694.743 penduduk Kota Semarang tercatat tidak mengalami sakit sepanjang tahun 2023. Jika dipersentasekan, maka ada 96,397% penduduk Kota Semarang yang dinyatakan sehat. Adapun penyakit yang paling umum dialami penduduk Kota Semarang sepanjang tahun 2023 adalah diare, dimana ada 36.534 orang yang mengalaminya. Sementara itu, kusta menjadi penyakit yang paling sedikit dialami penduduk di Kota Semarang sepanjang tahun 2023.

2.2.4 Kondisi Sosial Politik

Sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, Kota Semarang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Pada Pilpres 2024, Kota Semarang memiliki jumlah daftar pemilih tetap sebesar 1.239.669 orang, atau tiga kali lipat lebih besar dari jumlah daftar pemilih tetap di Kota Solo (KPU Kota Semarang). Jika dipersentasekan dari jumlah daftar pemilih tetap nasional yang mencapai 204.807.222 orang, maka Kota Semarang memiliki suara senilai 0,61% dari 100% suara yang diperebutkan. Berdasarkan pada angka tersebut, masyarakat Kota Semarang menjadi salah satu aspek penting yang dapat memberikan pengaruh besar dalam perolehan suara pada pemilihan presiden dan wakil presiden.

Mengingat besarnya pengaruh politik yang dihasilkan di Kota Semarang, maka penting bagi partai politik maupun aktor politik manapun untuk memperoleh dukungan dari masyarakat Kota Semarang. Oleh karena itu, Kota Semarang kerap dijadikan sebagai indikator tren politik di tingkat provinsi maupun nasional. Biasanya, perolehan suara pilpes di tingkat nasional tidak akan berbeda jauh dengan perolehan suara di tingkat Kota Semarang. Berikut adalah

tabel hasil pemilihan Presiden dan Wakil Ptesiden di Kota Semarang pada tahun 2019 dan 2024:

Tabel 2. 22 Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Semarang Dari Tahun 2019-2024

Tahun	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Partai Pengusung dan Pendukung	Perolehan Suara di Kota Semarang	Perolehan Suara Nasional
2019	Joko Widodo – Ma’ruf Amin	PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, PKB, PPP, PMB, PJK, Hanura, PSI, Perindo, PKPI, PBB	77,91%	55,50%
	Prabowo Subianto – Sandiaga Uno	Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, Berkarya	22,09%	45,50%
2024	Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar	NasDem, PKB, PKS	15,40%	24,95%
	Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka	Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, PSI, Garuda, Partai Aceh, PRIMA	47,60%	58,59%
	Ganjar Pranowo – Mahfud MD	PDI Perjuangan, PPP, Hanura, Perindo	36,80%	16,47%

Sumber: KPU Kota Semarang

Berdasarkan tabel data diatas, dapat diketahui bahwa keluarga Presiden Jokowi selalu mendominasi pada perolehan suara di Pilpres, baik di tingkat Kota Semarang maupun di tingkat nasional. Pada Pilpres 2019, Jokowi-Ma’ruf sangat digdaya di Kota Semarang dengan memperoleh 77,91% suara. Angka ini lebih besar dibandingkan perolehan suara di tingkat nasional yang hanya mencapai 55,50% suara. Pada Pilpres 2024, perolehan suara Prabowo-Gibran yang didukung oleh Presiden Jokowi juga berhasil memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, karena beberapa faktor termasuk isu politik dinasti yang semakin berkembang, perolehan suara Prabowo-Gibran di Kota

Semarang tidak lebih besar dibandingkan tingkat nasional. Di Kota Semarang, mereka hanya meraih 47,60% suara, sedikit lebih rendah dibandingkan 58,59% di tingkat nasional.

Sama seperti Kota Solo, Kota Semarang juga dikenal sebagai kendang banteng. Julukan ini merujuk pada kuatnya dominasi PDI Perjuangan dalam berbagai kontestasi politik di Kota Semarang, baik dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif. Mayoritas masyarakat Kota Semarang memiliki kepercayaan politik yang begitu besar terhadap figur-figur yang diusung PDI Perjuangan dalam pemilu. Meski pada Pilpres 2024 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung PDI Perjuangan gagal meraih kemenangan, namun track record PDI Perjuangan dalam kontestasi pemilu di Kota Semarang sangat baik. Basis massa yang kuat, loyalitas pemilih yang tinggi, serta pengaruh politik yang telah terbangun selama bertahun-tahun menjadikan Kota Semarang sebagai salah satu wilayah strategis bagi PDI Perjuangan dalam setiap pemilu.

Sejak pilkada pertama yang diselenggarakan di Kota Semarang pada tahun 2005, walikota dan wakil walikota terpilih di Kota Semarang lebih banyak berasal dari PDI Perjuangan. Terhitung, PDI Perjuangan hanya satu kali mengalami kekalahan dalam pilkada, yakni pada Pilkada 2005. Pada saat itu, gabungan koalisi PAN, PPP dan PKB berhasil memenangkan Sukawi Sutarip dan Machfud Ali sebagai Walikota dan Wakil Walikota Semarang periode 2005-2010. Sementara itu, pada Pilkada Semarang tahun 2010, 2015, 2020, dan 2024, PDI Perjuangan sukses memperoleh kemenangan. Berikut tabel hasil pemilihan walikota dan wakil walikota Semarang sejak tahun 2005-2024:

**Tabel 2. 23 Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang
Dari Tahun Ke Tahun**

Tahun	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Partai Pengusung dan Pendukung	Perolehan Suara
2005	Sukawi Sutarip - Machfud Ali	PAN, PPP dan PKB	73,88%
	Soediro Atmo Prawiro - Akmad Musyafir	Demokrat	14,84%
	Bambang Raya - Siti Chomsiyati Sutrisno S	Golkar dan PDS	7,6%
	Soendoro - R. Yuwanto	PDI Perjuangan	3,59%
2010	Soemarmo Hadi Saputro – Hendrar Prihadi	PDI Perjuangan	34,28%
	Mahfudz Ali - Anis Nugroho Widharto	Demokrat	31,05%
	Bambang Raya Saputra-Kristanto	Golkar, PDS, PKPI, PKPB, PKDI, PBN, PMB, PPDI, PNBKI, PPD, PPI, PIS, Buruh dan Kedaulatan	16,79%
	Harini Krisniati-Ari Pubono	Gerindra dan PKS	9,4%
	M. Farchan - Dasih Ardiyantari	PPP, PAN, dan PKB	8,31%
2015	Hendrar Prihadi - Hevearita Gunaryanti Rahayu	PDI Perjuangan, Nasdem, dan Demokrat	46,36%
	Soemarmo Hadi Saputro - Zuber Safawi	PKB dan PKS	31,96%
	Sigit Ibnu Groho - Agus Sutyoso	Gerindra, PAN, dan Golkar	21,68%
2020	Hendrar Prihadi - Hevearita Gunaryanti Rahayu	PDI Perjuangan, Gerindra, PKS, Demokrat, PKB, Golkar, Nasdem, PSI, dan PAN	91,56%
	Kotak Kosong	-	8,44%
2024	Agustina Wilujeng Pramestuti -Iswar Aminuddin	PDI Perjuangan, Ummat, Hanura PBB, dan PKN	57,24%
	H. A.S Sukawijaya (Yoyok Sukawi) - Joko Santoso	Demokrat, Gerindra, PKS, PKB, Golkar, PSI, Nasdem, PAN, PPP, Gelora, Perindo, Buruh, dan Garuda	42,76%

Sumber: KPU Kota Semarang

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa pasangan walikota dan wakil walikota terpilih di Kota Semarang lebih banyak dimenangkan oleh figur yang diusung oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan berhasil memenangkan pilkada Kota Semarang sebanyak empat kali, mulai dari Soemarmo Hadi Saputro - Hendrar Prihadi pada Pilkada 2010, Hendrar Prihadi - Hevearita Gunaryanti Rahayu pada Pilkada 2015 dan 2020, serta Agustina Wilujeng Pramestuti -Iswar Aminuddin pada Pilkada 2024. Adapun kemenangan terbesar PDI Perjuangan pada pilkada Kota Semarang terjadi pada tahun 2020, dimana pasangan Hendrar Prihadi - Hevearita Gunaryanti Rahayu berhasil mengalahkan kotak kosong dengan perolehan suara 91,56%. Pilkada 2020 juga menjadi edisi pilkada pertama di Kota Semarang yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon walikota dan wakil walikota, dimana semua partai parlemen bergabung untuk mendukung Hendrar Prihadi - Hevearita Gunaryanti Rahayu yang merupakan kader dari partai PDI Perjuangan.

Selain mendominasi pada pemilihan kepala daerah, PDI Perjuangan juga mendominasi pada pemilihan legislatif di Kota Semarang. Dalam 4 periode terakhir, PDI Perjuangan hampir selalu mendapatkan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kota Semarang, kecuali pada pemilihan legislatif 2010, dimana Demokrat berhasil mengungguli PDI Perjuangan pada perolehan kursi di DPRD Kota Semarang. Berikut data perolehan kursi partai politik pada DPRD Kota Semarang dalam 4 periode terakhir:

**Tabel 2. 24 Perolehan Kursi Partai Politik Pada DPRD Kota Semarang
Dalam 4 Periode Terakhir**

Partai Politik	Jumlah Kursi			
	2009-2014	2014-2019	2019-2024	2024-2029
PDI Perjuangan	9	15	19	14
PKB	2	4	4	5
Gerindra	4	7	6	7
Golkar	5	5	3	4
<u>NasDem</u>	-	1	2	1
<u>PKS</u>	6	6	6	6
<u>Hanura</u>	1	0	0	0
<u>PAN</u>	6	4	2	1
<u>Demokrat</u>	16	6	6	6
<u>PSI</u>	-	-	2	5
<u>PPP</u>	1	2	0	1
Jumlah Anggota	50	50	50	50
Jumlah Partai	9	9	9	10

Sumber: KPU Kota Semarang

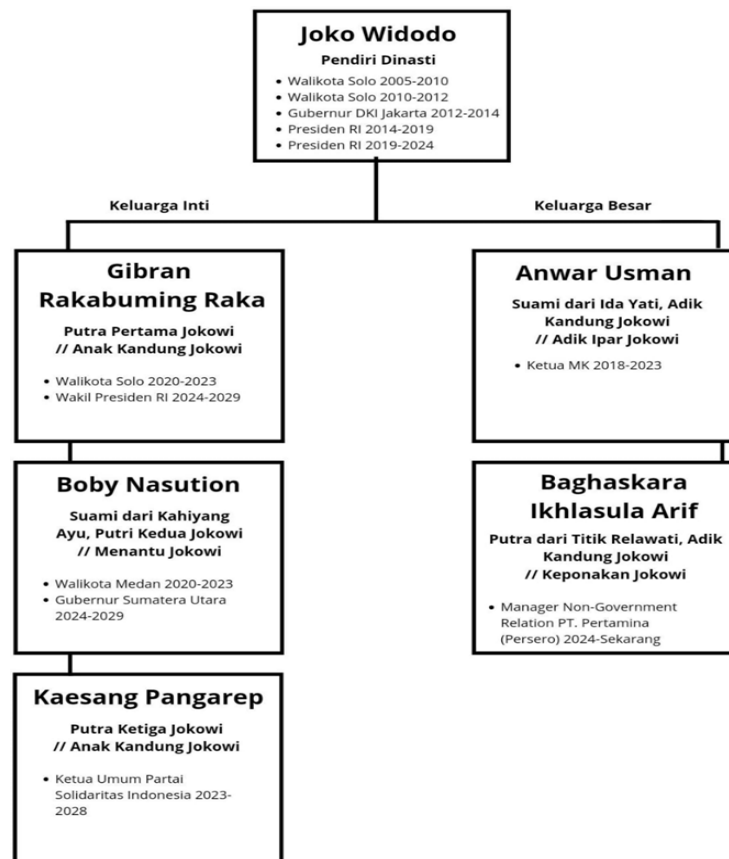
Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa perolehan kursi legislatif di Kota Semarang juga masih di dominasi PDI Perjuangan. Meski PDI Perjuangan sempat kalah jumlah kursi dari Demokrat pada periode 2010-2015, namun pada tiga periode berikutnya PDI Perjuangan mampu unggul kembali secara berturut-turut. Situasi ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat Kota Semarang terhadap figur walikota dan wakil walikota sejalan dengan kepercayaan mereka terhadap figur legislatif di DPRD Kota Semarang.

Periode 2019-2024 merupakan masa kejayaan bagi PDI Perjuangan di Kota Semarang, dengan mengamankan 19 dari 50 kursi di parlemen. Jumlah tersebut menunjukkan dominasi PDI Perjuangan dalam peta politik di Kota Semarang pada periode waktu tersebut. Adapun pada pemilihan legislatif 2024, PDI Perjuangan mengalami penurunan jumlah suara yang cukup signifikan di Kota Semarang yang mengakibatkan penurunan jumlah kursi di parlemen, dari yang semula 19 kursi menjadi 14 kursi. Meski penurunan ini terbilang cukup signifikan, PDI Perjuangan tetap menjadi menjadi partai dengan anggota legislatif terbanyak di Kota Semarang pada periode waktu tersebut.

2.3 Politik Dinasti Presiden Jokowi

Politik dinasti adalah proses pergantian kekuasaan yang melibatkan kepentingan pada suatu keluarga, dengan maksud untuk memperoleh dan menjaga kekuasaan yang dimiliki (Dedi, 2022). Sebagai seorang politisi, Presiden Jokowi tidak terlepas dari berbagai tuduhan sebagai pelaku politik dinasti. Tuduhan ini muncul seiring dengan banyaknya anggota keluarga Presiden Jokowi yang mulai aktif memasuki arena politik, terutama dalam lima tahun terakhir. Berikut adalah bagan yang dapat menggambarkan bagaimana Jokowi mewariskan kekuasaan politiknya pada keluarga:

Gambar 2. 5 Bagan Politik Dinasti Presiden Jokowi



Sumber: Olahan Data Peneliti, Gambaran Politik Dinasti Presiden Jokowi

Dari bagan tersebut, dapat diketahui bahwa politik dinasti Presiden Jokowi terdiri dari keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti adalah anggota keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan secara langsung pada satu rumah tangga, bisa antara

orangtua dengan anaknya, orangtua dengan menantunya, ataupun suami dengan istrinya. Dalam hal ini, anggota keluarga inti Presiden Jokowi yang menjadi bagian dari politik dinasti Presiden Jokowi adalah Gibran Rakabuming Raka selaku putra pertama, Bobby Nasution selaku menantu, serta Kaesang Pangarep selaku putra ketiga. Adapun keluarga besar adalah anggota keluarga yang berada diluar keluarga inti yang mencakup kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. Dalam hal ini, anggota keluarga besar Presiden Jokowi yang menjadi bagian dari politik dinasti Jokowi adalah Anwar Usman selaku adik ipar dan Baghaskara Iklasula Arif selaku keponakan (Bhayangkara, 2024).

2.3.1 Gibran Rakabuming Raka dan Aktivitas Politiknya

Gibran Rakabuming Raka adalah putra pertama dari pasangan Joko Widodo dan Iriana yang lahir di Kota Solo pada tanggal 1 Oktober 1987 (Bhayangkara, 2024). Sebelum terjun di dunia politik, Gibran adalah seorang pebisnis yang berkecimpung di bidang kuliner. Beberapa bisnis Gibran yang paling terkenal adalah Markobar dan Chili, yang masing-masing diantaranya adalah bisnis martabak dan *catering*. Pada tahun 2019, Gibran mencoba peruntungannya di dunia politik dengan bergabung sebagai kader PDI Perjuangan. Langkah ini diambil tidak lama setelah ayahnya kembali terpilih sebagai Presiden RI pada periode kedua.

Tidak lama setelah bergabung dengan PDI Perjuangan, Gibran mendapatkan rekomendasi untuk ikut bersaing pada Pilkada Solo 2020. Situasi ini mirip dengan yang terjadi pada ayahnya saat memulai karir politiknya di tahun 2005. Pada Pilkada Solo 2020, Gibran berhasil menang dengan memperoleh 86,5% suara. Jumlah suara ini jadi yang terbesar kedua dalam sejarah Pilkada Kota Solo setelah kemenangan Jokowi di tahun 2010. Dengan kemenangan ini,

Gibran resmi terpilih sebagai Walikota Solo periode 2020-2025. Banyak pengamat yang menilai bahwa kemenangan Gibran di Kota Solo banyak dipengaruhi oleh kharisma dari ayahnya yang masih sangat dicintai sebagian besar masyarakat Kota Solo saat itu.

Belum selesai menjabat sebagai walikota, pada tahun 2024 Gibran mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden periode 2024-2029 mendampingi Prabowo Subianto. Kala itu, Gibran diusung oleh gabungan partai Koalisi Indonesia Maju, dimana di dalam koalisi tersebut tidak ada PDI Perjuangan selaku partai yang menaungi Gibran sejak 2019. Banyak pihak yang menilai pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden dipenuhi dengan problematika, mulai dari usianya yang tidak sesuai dengan regulasi, proses pencalonannya yang tidak melalui PDI Perjuangan, jabatannya sebagai walikota yang belum tuntas, hingga pengalamannya di bidang politik yang masih sangat singkat. Meski diwarnai berbagai problematika, Gibran berhasil terpilih sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029 yang menandai loncatan karir politiknya yang sangat signifikan (Ihsan, Karlinah, & Adiputra, 2023).

2.3.2 Bobby Nasution dan Aktivitas Politikanya

Muhammad Bobby Afif Nasution atau Bobby Nasution adalah anak terakhir dari tiga bersaudara dalam keluarga Batak Mandailing. Bobby lahir di Kota Medan pada tanggal 5 Juli 1991 (Bhayangkara, 2024). Pada tahun 2017, Bobby resmi menjadi bagian dari keluarga Presiden Jokowi setelah menikahi Kahiyang Ayu yang merupakan putri kedua dari Joko Widodo dan Iriana. Tiga tahun setelah pernikahannya dengan Kahiyang, Bobby memutuskan untuk terjun ke dunia politik mengikuti jejak mertuanya. Saat itu, Bobby bergabung dengan PDI Perjuangan dan mendapat rekomendasi untuk mengikuti Pilkada Kota

Medan. Sama seperti Gibran, Bobby berhasil memenangkan Pilkada dengan perolehan 53,45% suara. Saat itu, Bobby yang dipasangkan dengan Aulia Rahman berhasil unggul tipis dari Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi yang menjadi pesaingnya pada Pilkada Medan 2020. Hasil ini menempatkan Bobby sebagai Walikota Medan periode 2020-2025 (Bhayangkara, 2024).

Pada akhir tahun 2023, tepatnya saat penetapan peserta calon presiden dan calon wakil presiden pada kontestasi Pilpres 2024, Bobby memutuskan untuk mendukung kakak iparnya yang diusung sebagai calon wakil presiden oleh Koalisi Indonesia Maju. Langkah yang diambil Bobby bertentangan dengan PDI Perjuangan yang pada saat itu memilih untuk mencalonkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Manuver politik yang dilakukan Bobby sejalan dengan yang dilakukan oleh keluarga Presiden Jokowi, sehingga Bobby harus dipecat oleh PDI Perjuangan karena dianggap melanggar kode etik partai.

Setelah kehilangan statusnya sebagai kader PDI Perjuangan, Bobby mendapatkan dukungan dari Golkar, Gerindra, dan partai anggota KIM Plus untuk berkontestasi pada Pilkada Sumatera Utara 2024. Bobby yang masih menjabat sebagai Walikota Medan didampingi oleh Surya yang merupakan Bupati Kabupaten Asahan mampu memenangkan Pilkada Sumatera Utara dengan memperoleh suara sebesar 64,47%. Hasil ini menempatkan Bobby sebagai Gubernur Sumatera Utara terpilih untuk periode 2025-2030, sekaligus membuat PDI Perjuangan dan Edy Rahmayadi yang merupakan Gubernur pertahana harus menerima kekalahan (Ihsan, Karlinah, & Adiputra, 2023).

2.3.3 Kaesang Pangarep dan Aktivitas Politikny

Kaesang Pangarep adalah putra terakhir dari pasangan Joko Widodo dan Iriana yang lahir di Kota Solo pada tanggal 25 Desember 1994 (Bhayangkara, 2024). Sebelum terjun di dunia politik, Kaesang aktif sebagai influencer di berbagai media sosial, sekaligus pelaku bisnis di bidang kuliner. Pada tahun 2023, secara mengejutkan PSI mengumumkan Kaesang sebagai ketua umum barunya untuk periode 2023-2028. Langkah Kaesang yang secara tiba-tiba ditunjuk sebagai Ketua Umum PSI menimbulkan beragam reaksi dari publik. Terlepas dari reaksi pro dan kontra yang muncul, banyak pengamat politik yang menilai bahwa PSI sedang berusaha untuk menarik simpatisan Pro Jokowi agar dapat mendukung PSI, sehingga elektabilitas partai dapat meningkat.

Pada pilkada serentak 2024, Kaesang sempat diisukan akan maju sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah mendampingi Ahmad Luthfi. Sayangnya, usia Kaesang yang belum genap menginjak 30 tahun bertentangan dengan regulasi mengenai batas usia calon gubernur dan wakil gubernur. Persoalan mengenai batasan usia ini sampai digugat oleh salah seorang masyarakat yang menginginkan adanya perubahan aturan batasan usia bagi calon gubernur dan wakil gubernur, dari yang semula berusia 30 tahun pada saat penetapan calon menjadi 30 tahun pada saat pelantikan. Gugatan ini kemudian di tolak, sehingga pencalonan Kaesang tidak dapat dilakukan (Ihsan, Karlinah, & Adiputra, 2023).

2.3.4 Bagaskara Ikhlasulla Arif dan Perannya di Pertamina

Bagaskara Ikhlasulla Arif adalah putra dari pasangan Arif Budi Sulistyو dan Titik Relawati, dimana Titik adalah adik bungsu dari Presiden Jokowi. Bagaskara lahir di Kota Solo pada tanggal 16 Agustus 1993 (Bhayangkara, 2024). Berbeda dengan anak dan menantu Jokowi yang berfokus pada bisnis

pribadi dan jabatan politik, Bagaskara lebih memilih jalan untuk berkarir di perusahaan BUMN, sama seperti yang dilakukan Presiden Jokowi dulu sebelum menjalankan bisnis mebel.

Sepanjang karirnya, Bagaskara tercatat pernah bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI pada tahun 2018 sebagai *Vice President Government Relation and CSR*, sebelum akhirnya pindah ke PT. Pertamina (Persero) sebagai *Senior Expert Government Relation* pada tahun 2021. Jenjang karir Bagaskara di Pertamina sangat cepat, dimana pada tahun 2024 ia diangkat sebagai *Manager Non-Governer Relation*. Sebagai bagian dari keluarga besar Presiden Jokowi, Bagaskara tidak terlepas dari berbagai isu nepotisme, mengingat karirnya yang sangat cemerlang di perusahaan negara (Ihsan, Karlinah, & Adiputra, 2023).

2.3.5 Anwar Usman dan Dinamika Kepemimpinannya di Mahkamah Konstitusi

Anwar Usman adalah seorang tokoh hukum Indonesia, sekaligus suami dari Ida Yati yang merupakan adik kandung Presiden Jokowi. Anwar Usman lahir di Indramayu pada tanggal 6 Juni 1950 (Bhayangkara, 2024). Sebelum menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman menjadi hakim agung di Mahkamah Agung, dan pernah menjabat sebagai Dosen Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia. Pada tahun 2018, Anwar Usman resmi diangkat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Jabatan ini merupakan posisi tertinggi dalam lembaga peradilan konstitusi di Indonesia.

Pada kontestasi Pemilihan Presiden 2024, Anwar Usman memimpin sidang putusan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh salah seorang mahasiswa di Kota Solo. Anwar Usman selaku ketua Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tersebut, sehingga memuluskan

jalan Gibran yang merupakan keponakannya untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Keputusan ini membuat Anwar Usman harus diberhentikan secara tidak hormat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, karena dinilai melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam Sapta Karsa Utama (Ihsan, Karlinah, & Adiputra, 2023).

